

PENGARUH MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Arsyi Hafizhan Hilmi¹, Rochman Marota², Mutiara Puspa Widjowati³

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pakuan

Email korespondensi: ² hafizhanarsyi99@gmail.com

ABSTRAK

Mekanisme *Corporate Governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam peningkatan efisiensi ekonomi yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Mekanisme tata kelola juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran dari suatu perusahaan dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap *Corporate Social Responsibility*. Populasi penelitian ini adalah perusahaan barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2021. Hasil analisis menunjukkan bahwa Hasil uji t menunjukkan bahwa Dewan Komisaris berpengaruh secara parsial terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan nilai signifikansi sebesar ($0.000 < 0.05$), Hasil Uji t menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh secara parsial terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan nilai signifikansi sebesar ($0.963 > 0.05$), Hasil uji f menunjukkan bahwa Dewan Komisaris, dan Kepemilikan Institusional berpengaruh secara simultan terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR)..

Kata Kunci : *Good Corporate Governance*, Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional Dan CSR

ABSTRACT

The mechanism of Corporate Governance is one of the key elements in increasing economic efficiency and includes a series of relationships between company management, the board of commissioners, shareholders, and other stakeholders. Governance mechanisms also provide a structure that facilitates the targeting of an enterprise and serves as a vehicle for determining performance monitoring techniques. This study aims to determine the effect of Good Corporate Governance Mechanisms on Corporate Social Responsibility. The population of this study is composed of primary consumer goods companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019–2021. The results of the analysis show that the results of the t test show that the Board of Commissioners has a partial effect on Corporate Social Responsibility (CSR) with a significance value of ($0.000 < 0.05$). The results of the t test show that institutional ownership has no partial effect on Corporate Social Responsibility (CSR) with a significance value of ($0.963 > 0.05$). The results of the f test show that the Board of Commissioners and institutional ownership have a simultaneous effect on Corporate Social Responsibility (CSR).

Keywords: *Good Corporate Governance, Board of Commissioners, Institutional Ownership, and Corporate Social Responsibility*

PENDAHULUAN

Dunia usaha memegang peran yang sangat penting dalam sistem ekonomi dengan cara turut berpartisipasi dalam kegiatan sosial maupun kegiatan apapun yang bertujuan untuk mengembangkan lingkungan, meningkatkan dan membangun perekonomian serta mensejahterahkan kehidupan masyarakat agar lebih baik lagi, atau dapat disebutkan dengan Corporate Social Responsibility (CSR).

Seperti halnya ditetapkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74, bahwa pihak perseroan wajib melaksanakan tanggungjawab sosial serta lingkungan, dan jika perusahaan tersebut tidak melaksanakannya maka akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan. Corporate Social Responsibility atau Tanggung Jawab Sosial yang dibebankan pada perusahaan adalah suatu program kepedulian dari perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, kontribusi yang diberikan dapat mendorong pemberdayaan masyarakat

Menurut Noorizkie (2017), perusahaan merupakan suatu bentuk Entitas tempat terjadinya suatu kesatuan dari berbagai fungsi operasional yang bekerja secara sistematis dalam mencapai sasaran tertentu. Sasaran dalam suatu perusahaan merupakan tujuan yang ingin dicapai semua pihak yang berkepentingan dalam suatu perusahaan (stakeholder and shareholder). Untuk mencapai tujuan tersebut, pihak- pihak yang berkepentingan dalam perusahaan harus bekerja sama secara sistematis demi menghasilkan suatu kinerja yang optimal. Salah satu cara untuk mengetahui apakah suatu perusahaan dalam menjalankan operasinya telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan sesuai dengan tujuan adalah dengan mengetahui kinerja perusahaan tersebut

Perkembangan ekonomi kehidupan bisnis yang sangat pesat dan semakin kuat, setiap perusahaan selalu berusaha untuk dinamis mengikuti keinginan pasar dan tuntutan eksternal. Persaingan yang semakin ketat memaksa perusahaan untuk menciptakan citra dan persepsi yang baik di antara seluruh pemangku kepentingan. Semakin sulit persaingan maka semakin seimbang perusahaan ingin beroperasi dengan memperhatikan Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik. Tujuan utama pebisnis saat memulai bisnis adalah menghasilkan keuntungan, meningkatkan penjualan, memaksimalkan nilai saham, dan meningkatkan kekayaan pemegang saham. Jika suatu perusahaan tidak kompetitif, ia menghadapi kegagalan atau kebangkrutan, sehingga perusahaan tersebut tidak dapat bersaing dengan perusahaan lain.

Ada banyak strategi yang dapat digunakan organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi aktivitas bisnis serta memastikan kelangsungan bisnis. Pada beberapa perusahaan, Good Corporate Governance dilakukan untuk kinerja keuangan. pada saat kondisi sulit atau karena perusahaan ingin memasuki pasar baru. Peneliti memilih strategi Good Corporate Governance untuk kinerja keuangan perusahaan karena ingin mengetahui apakah strategi ini masih relevan ketika diterapkan di era yang semakin sulit ini.

Corporate Social Responsibility merupakan bentuk pemahaman perusahaan tentang pentingnya tanggung jawab perusahaan dalam meminimalisir dampak negatif yang timbul dari segala kebijakan dan aktifitas operasional perusahaan. Corporate Social Responsibility adalah salah satu gagasan yang menjelaskan bahwa perusahaan tidak lagi dihadapkan pada Single Bottom Line yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan pada kondisi keuangannya, namun perusahaan sudah harus berpijak pada Triple Bottom Lines yang dikenal dengan 3P (Profit, People, Planet) yaitu finansial (profit), sosial (people) dan lingkungan (planet).

Keberlanjutan suatu perusahaan akan terjamin apabila perusahaan dapat memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Perusahaan diperlukan memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, dikarenakan investor cenderung lebih tertarik dengan perusahaan yang memiliki citra yang

baik dimata lingkungan dan masyarakat luas untuk dapat memastikan keberlangsungan perusahaan dan dapat meningkatkan nilai pasar melalui penerapan tersebut.

Penelitian ini didasari dengan adanya fenomena-fenomena tentang kurangnya penerapan GCG dengan baik yang berdampak pada kinerja keuangan. Kasus PT Mayora Indah Tbk. Yang merupakan produsen makanan dan minuman, pada akhir juli kuartal I tahun 2019, mencatatkan margin bersih 7,75%, kemudian dilaporkan pada kuartal II-2019, margin bersih perusahaan berada di kisaran 6,7%, sehingga margin bersih kurtal I dan kuartal II 2019 mengalami penurunan sebesar 1,05% (www.cnbcindonesia.com, 2019). Fenomena ini memperkuat gagasan bahwa penerapan good corporate governance mempengaruhi baik dan buruknya kinerja dan laporan keuangan di suatu perusahaan. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa perusahaan belum sepenuhnya menerapkan GCG dengan baik dan berdampak pada laporan dan kinerja keuangan yang kurang baik.

Menurut Sinaga (2020), salah satu penyebabnya adalah lemahnya penerapan praktik Good Corporate Governance (GCG) pada perusahaan di Indonesia, seperti lemahnya hukum, standar akuntansi dan pemeriksaan keuangan (auditing) yang belum mapan, lemahnya pengawasan komisaris, dan terabaikannya hak minoritas. Sejak saat itu baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek Corporate Governance.

Pada penelitian ini, mekanisme Corporate Governance yang akan dikaji terdiri dari ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan institusional. Penelitian ini memilih mekanisme tersebut karena dianggap memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan Corporate Governance yang mana mekanisme tersebut memiliki tugas mengendalikan dan mengontrol perusahaan secara langsung sehingga dapat meminimalisir masalah keagenan yang mungkin akan terjadi akibat perbedaan kepentingan. Dewan komisaris sebagai organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan Good Corporate Governance. Berkaitan dengan ukuran dewan komisaris, Coller dan Gregory(1999) menyatakan, bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, semakin mudah untuk mengendalikan Chief Executives Officer (CEO) dan semakin efektif dalam memonitor aktivitas manajemen serta semakin efektif memaksimalkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Penelitian yang dilakukan oleh Alysha Fadjhri Ramadhani, Suhendro, Purnama Siddi (2022), menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Muntiah (2016) tidak menunjukkan hasil yang serupa.

Kepemilikan institusional berperan sebagai mekanisme pengendalian eksternal manajemen. Kepemilikan institusional suatu perusahaan akan meningkatkan efisiensi pemakaian aset perusahaan akan meningkatkan efisiensi pemakaian aset perusahaan, dengan demikian diharapkan akan ada pemantauan atas keputusan manajemen, akan mendorong kinerja perusahaan menjadi lebih baik atau sesuai yang diharapkan investor, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Arifani (2018) menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Muntiah (2016) tidak menunjukkan hasil yang serupa

Good Corporate Governance sebagai kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Menurut Cika Nirmala, dkk (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Good Corporate Governance tidak berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility

Penelitian tentang pengaruh Corporate Governance terhadap Corporate Social Responsibility memunculkan hasil yang beragam dan menarik untuk dikaji lebih dalam. Beberapa peneliti telah menguji hubungan diantara kedua variabel tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti kinerja keuangan perusahaan dengan Good Corporate Governance dan dituangkan ke dalam judul “Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap CSR Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja *Corporate Social Responsibility* perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menguji pengaruh ukuran kepemilikan institusional terhadap *Corporate Social Responsibility* perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS¹

Good Corporate Governance

Good Corporate Governance di Indonesia mulai ramai dikenal pada tahun 1997, saat krisis ekonomi menerpa Indonesia yang membuat istilah Good Corporate Governance kian populer hingga saat ini dan ditempatkan diposisi terhormat dikarenakan Good Corporate Governance menjadi salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan sebuah persaingan bisnis global dan juga karena krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan dari Good Corporate Governance.

Sebagai sebuah konsep, Good Corporate Governance ternyata tak memiliki defenisi tunggal bahkan disejumlah Negara juga memiliki defenisi tersendiri tentang Good Corporate Governance walaupun agak mirip namun terdapat sedikit perbedaan istilah. Defenisi Good Corporate Governance menurut Bank Dunia adalah kumpulan aturan, hukum, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, mampu menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan untuk para pemegang saham ataupun masyarakat sekitar secara menyeluruh.

Pada buku “The Power of Good Corporate Governance” mengatakan bahwa pengertian Good Corporate Governance adalah suatu sistem pengendalian internal (internal control) suatu perusahaan yang memiliki tujuan untuk mengelola risiko yang signifikan dalam rangka memenuhi tujuan bisnis, dan itu dilakukan dengan cara pengamanan asset dan peningkatan nilai investasi para pemegang saham dalam jangka waktu yang panjang.

Lalu Good Corporate Governance selanjutnya merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, jajaran direksi, dan stakeholders lainnya. Dengan kata lain, Good Corporate Governance ini dilakukan dengan proses yang transparan dalam rangka untuk menentukan tujuan, pencapaian, serta penilaian kinerja suatu perusahaan.

¹ Untuk penelitian kualitatif, cukup “Kajian Literatur”.

Good Corporate Governance merupakan sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, pemegang saham dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan, Corporate Governance juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja.

Menurut keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU (2002), Good Corporate Governance adalah suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan Stakeholders lainnya. Berlandaskan peraturan perundangan dan nilai etika.

Tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) struktur oleh stakeholders, pemegang saham, komisaris dan manjer menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan mengawasi kinerja OECD (2003).

Berdasarkan SK Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006, Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut;

1. Keterbukaan (Transparency)
2. Akuntabilitas (Accountability)
3. Pertanggungjawaban (Responsibility)
4. Independensi (Independency)
5. Kewajaran (Fairness)

Menurut Price Waterhouse Coopers, Good Corporate Governance terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem. Berbagai proses, kebijakan-kebijakan, dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien dan efektif dalam mengelola resiko dan bertanggungjawab dengan memperhatikan stakeholders.

Pengertian lain datang dari Finance Committee on Corporate Governance Malaysia. Menurut lembaga tersebut, Good Corporate Governance merupakan suatu proses setra struktur yang digunakan untuk mengarahkan sekaligus mengelola bisnis dan urusan perusahaan kearah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan.

Komite Cadbury mendefenisikan Good Corporate Governance adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar mencapai keseimbangan dengan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan. terdapat banyak defenisi Corporate Governance (tata kelola perusahaan). Corporate Governance didefenisikan IICG (Indonesian Institute of Corporate Governance), sebagai proses dan struktur dalam menjalankan perusahaan, dalam tujuan utama dalam meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang.

Dengan tetap memperhatikan Stakeholders yang lain. Corporate governance juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. Corporate Governance berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara.

Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia merupakan acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan Good Corporate Governance dalam rangka:

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu dewan komisaris, direksi dan rapat umum pemegang saham.
3. Mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Dari berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan dengan penerapan beberapa prinsip guna mencapai bisnis yang menguntungkan, pengambilan keputusan dan mengelola resiko yang efisien serta menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan perusahaan dan masyarakat sekitar.

Tujuan dan Manfaat Good Corporate Governance

Konsep Good Corporate Governance berkembang seiring dengan tuntutan publik yang menginginkan terwujudnya kehidupan bisnis yang sehat, bersih, dan bertanggung jawab. Tuntutan ini sebenarnya merupakan jawaban publik terhadap semakin maraknya kasus-kasus penyimpangan koperasi diseluruh dunia selain itu tuntutan ini juga mencerminkan keheranan publik mengapa kasus penyimpangan korporasi bisa terjadi dimanapun juga.

Di dalam era globalisasi dan persaingan dunia bisnis yang semakin tinggi dan kompetitif perusahaan-perusahaan dituntut memiliki Good Corporate Governance yang memuat ketentuan-ketentuan bagaimana perusahaan dimaksud berperilaku dan bertindak dalam menghadapi persaingan.

Good Corporate Governance bukanlah semata-mata persoalan membentuk organ-organ perusahaan seperti komisar independen dan komite audit, tapi Good Corporate Governance adalah bagaimana menciptakan pengelolaan perusahaan yang profesional melalui penerapan sistem accounting dan keuangan yang memenuhi standar serta bagaimana manajemen dilengkapi dengan sistem teknologi informasi yang mendukung operasional perusahaan.

Tujuan Good Corporate Governance pada intinya adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut adalah pihak internal yang meliputi;

1. Dewan komisaris
2. Direksi
3. Karyawan
4. Dan pihak eksternal yang meliputi investor, kreditur, pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholders).

Dalam praktiknya Corporate Governance berada disetiap negara dan perusahaan karena berkaitan dengan sistem ekonomi, hukum, struktur kepemilikan, sosial dan budaya. Perbedaan praktik ini menimbulkan beberapa versi yang menyangkut prinsip-prinsip Corporate Governance, namun pada dasarnya mempunyai banyak kesamaan;

1. Untuk dapat mewujudkan Good Corporate Governance disetiap perusahaan atau organisasi, perlu dibangun beberapa sarana pendukung yaitu: Perumusan visi, misi, dan tujuan perusahaan atau organisasi yang jelas.
2. Struktur organisasi yang menjamin keseimbangan pembagian tugas dan kejelasan tugas masing-masing, serta menghindari tumpang tindih dan hambatan birokratisme.
3. Kejelasan tanggungjawab dan kewenangan serta mekanisme kerja.
4. Budaya dan etika perusahaan.
5. Sistem pengendalian dan pengukuran kinerja.

Good Corporate Governance memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif sehingga tercipta mekanisme Checks and Balance di perusahaan. Dengan menerapkan Corporate Governance perusahaan, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh yakni:

Menurut FCGI (2001) manfaat dari penerapan Good Corporate Governance adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada Stakeholders.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan Corporate Value.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus.

Unsur-Unsur Good Corporate Governance

Unsur-unsur Good Corporate Governance berasal dari dalam perusahaan dan dari luar perusahaan. Unsur-unsur tersebut akan menjamin berfungsinya Good Corporate Governance. Unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan dan unsur yang selalu diperlukan dalam perusahaan dan unsur yang selalu diperlukan dalam perusahaan tersebut Good Corporate Governance – Internal perusahaan.

Unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan yaitu;

1. Pemegang saham
2. Direksi
3. Dewan komisaris
4. Manager, karyawan/serikat pekerja
5. Sistem remunerasi berbasis kinerja
6. Komite audit.

Sedangkan unsur-unsur yang selalu membutuhkan diluar perusahaan aturan dari;

1. Code Of Conduct
2. Fairness
3. Akuntabilitas
4. Jaminan hukum.

Asas-Asas Good Corporate Governance

Setiap perusahaan harus memastikan asas Good Corporate Governance (GCG) diterapkan pada setiap aspek bisnis disemua jajaran perusahaan. Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) menyatakan, asas Good Corporate Governance yaitu;

1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Responsabilitas
4. Independensi
5. Kewajaran dan kesetaraan

Yang diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholders). Menurut pedoman umum Good Corporate Governance Indonesia, GCG memiliki asas sebagai berikut:

1. Transparansi (Transparency) Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil

inisiatif untuk mengungkapkan tidak adanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangundangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (Accountability) Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
3. Responsibilitas (Responsibility) Perusahaan harus mematuhi peraturan perundangundangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai Good Corporate Citizen.
4. Independensi (Independency) Untuk melancarkan pelaksanaan asas Corporate Governance lainnya yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, serta kewajaran dan kesetaraan, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan dapat berfungsi tanpa saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. Keadilan (Fairness) Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Dalam prakteknya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) ini perlu dibangun dan dikembangkan secara bertahap. Perusahaan harus membangun sistem dan pedoman tata kelola perusahaan yang akan dikembangkannya.

Demikian juga dengan para karyawan, mereka perlu memahami dan diberikan bekal pengetahuan tentang prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang akan dijalankan perusahaan.

Untuk menjalankan semua prinsip Good Corporate Governance diatas, ada baiknya di barengi menggunakan kode etik perusahaan. Disamping itu, arahan yang sangat penting untuk Good Corporate Governance dalam penerapan konsep tersebut, maka dengan hal tersebut, visi dan misi perusahaan mampu tercapai.

Pedoman Good Corporate Governance merupakan sebuah pedoman yang dibuat oleh komite nasional Good Corporate Governance yang mempunyai fungsi sebagai acuan kepada para pelaku usaha untuk menjalankan perusahaannya dengan menerapkan sistem Good Corporate Governance secara konsisten dan konsekuen. Hal ini penting karena dengan adanya penerapan sistem Good Corporate Governance di dalam suatu perusahaan, maka ini dapat dijadikan tolak ukur pada perusahaan apakah kinerja perusahaan tersebut baik atau sebaliknya.

Melalui pemenuhan kepentingan yang seimbang, benturan kepentingan yang terjadi di dalam perusahaan bisa diarahkan dan dikontrol sedemikian rupa, sehingga tidak mengakibatkan timbulnya kerugian bagi suatu perusahaan.

Ada banyak macam korelasi antara implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance di dalam suatu perusahaan dengan kepentingan para pemegang saham, kreditur, manajemen perusahaan, karyawan perusahaan, dan tentunya para anggota masyarakat, merupakan indikator tercapainya keseimbangan kepentingan.

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility atau biasa disebut sebagai CSR merupakan istilah bahasa Inggris. Kata "Corporate" memiliki arti perusahaan, sementara "Social" berarti sosial, dan "Responsibility" bermakna tanggung jawab. Secara etimologi, pengertian dari Corporate Social Responsibility dapat dimaknai sebagai kegiatan perusahaan yang memiliki tanggung jawab secara sosial kepada masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas hingga pemangku kepentingan.

Dalam sebuah penelitiannya pada tahun 2008, Widjaja dan Yeremia mengungkapkan bahwa bentuk kerja sama antara perusahaan (tidak hanya Perseroan Terbatas (PT) dengan segala pemangku kepentingan baik secara langsung atau secara tidak langsung melakukan interaksi dengan perusahaan untuk tetap menjamin keberadaan dan keberlangsungan hidup usaha (sustainability) perusahaan tersebut.

Pendapat dari Widjaja dan Yeremia tersebut sama dengan sebuah tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan diharuskan memiliki komitmen untuk ikut serta dalam berperan melakukan pembangunan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan melestarikan lingkungan yang bermanfaat, baik untuk perusahaan atau perseroan sendiri, komunitas masyarakat setempat, hingga masyarakat pada umumnya.

Corporate Social Responsibility adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap sosial atau lingkungan sekitar. Bentuk-bentuk tanggung jawab dari sebuah perusahaan besar bisa sangat beragam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perbaikan terhadap lingkungan, pemberian beasiswa kepada anak dari masyarakat sekitar yang kurang mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, hingga sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial.

Tanggung jawab tersebut merupakan sebuah bentuk timbal balik dari perusahaan besar yang berada di wilayah sebuah masyarakat. Sudah menjadi fakta umum bahwa dengan berdirinya sebuah bisnis atau perusahaan besar memiliki potensi merusak lingkungan. Oleh karena itu, Corporate Social Responsibility diharapkan agar sebuah perusahaan dapat membantu mengurangi potensi kerusakan lingkungan atau bahkan malah potensi kerusakan lingkungan nol persen.

Corporate Social Responsibility sendiri memang dirumuskan sebagai bentuk strategi dari sebuah perusahaan besar untuk memenuhi dan mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan dari pemangku kepentingan atau stakeholdernya. Fenomena CSR banyak muncul setelah banyaknya kesadaran akan sustainability atau keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang lebih penting daripada sekedar keuntungan atau profitability.

Corporate Social Responsibility menurut Wahyudi (2008) memberikan definisi Corporate Social Responsibility adalah sebagai komitmen perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya didasarkan atas keputusan untuk mengambil kebijakan dan tindakan dengan memperhatikan kepentingan stakeholders dan lingkungan dimana perusahaan melakukan aktivitasnya berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku.

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering juga disebut sebagai social disclosure, corporate social reporting, social accounting (Mathews, 1995) atau corporate social responsibility (Hackston dan Milne, 1996) merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan (Sembiring, 2005).

John Elkington pada tahun 1997 dalam melalui bukunya "Cannibals with Fork, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business". Elkington mengembangkan konsep Triple Bottom Line dalam istilah economic prosperity, environmental quality dan social justice. Elkington memberikan pandangan bahwa

perusahaan yang ingin berkelanjutan, harus memperhatikan "3P". Selain mengejar keuntungan (profit), perusahaan juga mesti memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet).

Dalam gagasan tersebut, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada Single Bottom Line, yaitu aspek ekonomi yang direfleksikan dalam kondisi financial-nya saja, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.

Hubungan yang ideal antara profit (keuntungan), people (masyarakat) dan planet (lingkungan) adalah seimbang, tidak bisa mementingkan satu elemen saja. Konsep 3P ini menurut Elkington dapat menjamin keberlangsungan bisnis perusahaan. Hal ini dapat dibenarkan, sebab jika suatu perusahaan hanya mengejar keuntungan semata, bisa jadi lingkungan yang rusak dan masyarakat yang terabaikan menjadi hambatan kelangsungan bisnisnya. Beberapa perusahaan bahkan menjadi terganggu aktivitasnya karena tidak mampu menjaga keseimbangan 3P ini. Jika muncul gangguan dari masyarakat maka yang rugi adalah bisnisnya sendiri.

1. Keuntungan (Profit)

Profit merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan usaha. profit sendiri pada hakikatnya merupakan Sosial (people) Lingkungan (planet) Ekonomi (profit) tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Sedangkan aktivitas yang dapat ditempuh untuk mendongkrak profit antara lain dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya, sehingga perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif yang dapat memberikan nilai tambah semaksimal mungkin.

2. Masyarakat (People)

Menyadari bahwa masyarakat merupakan stakeholder penting bagi perusahaan, karena dukungan mereka, terutama masyarakat sekitar, sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan, maka sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat lingkungan, perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada mereka.

Perlu disadari bahwa operasi perusahaan berpotensi memberikan dampak kepada masyarakat, karenanya perusahaan perlu untuk melakukan berbagai kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

3. Lingkungan (Planet)

Lingkungan adalah sesuatu yang terkait dengan seluruh bidang kehidupan kita. Hubungan kita dengan lingkungan adalah hubungan sebab akibat, di mana jika kita merawat lingkungan, maka lingkungan pun akan memberikan manfaat kepada kita sebaliknya, jika kita merusaknya, maka kita akan menerima akibatnya. Namun sayangnya, sebagian besar dari kita masih kurang peduli dengan lingkungan sekitar.

Hal ini disebabkan karena tidak adanya keuntungan langsung didalamnya. Maka, kita melihat banyak pelaku industri yang hanya mementingkan bagaimana menghasilkan uang sebanyak-banyaknya tanpa melakukan upaya apapun untuk melestarikan lingkungan. Padahal, dengan melestarikan lingkungan, mereka justru akan memperoleh keuntungan yang lebih, terutama dari sisi kesehatan, kenyamanan, disamping ketersediaan sumber daya yang lebih terjamin kelangsungannya.

Mendongkrak laba dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi memang penting, namun tak kalah pentingnya juga memperhatikan pelestarian lingkungan. Disinilah perlunya penerapan konsep Triple Bottom Line atau 3BL, yakni profit, people, dan planet. Dengan kata lain, "jantung hati" bisnis bukan hanya profit (laba) saja, tetapi juga people (manusia) dan jangan lupa, planet (lingkungan).

Dauman dan Hargreaves (1992) dalam Hasinuan (2001) dalam Sulastini (2007) menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan dapat dibagi menjadi tiga level sebagai berikut:

1. Basic Responsibility (BR)

Pada level pertama menghubungkan tanggung jawab pertama dari satu perusahaan, yang muncul karena keberadaan perusahaan tersebut seperti: perusahaan harus membayar pajak, memenuhi hukum, memenuhi standar pekerjaan, dan memuaskan pemegang saham. Bila tagging jawab pada level ini tidak dipenuhi akan menimbulkan dampak yang sangat serius.

2. Organization Responsibility (OR) Pada kedua ini menunjukkan tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi perubahan kebutuhan tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi perubahan kebutuhan stakeholder seperti pekerja, pemegang saham dan masyarakat disekitar.

3. Societal Responsibility (SR)

Pada level ketiga ini, menunjukkan tahan Ketika interaksi antara bisnis dan kekuatan lain dalam masyarakat yang demikian kuat sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan, terlibat dengan apa yang terjadi dalam lingkungan secara keseluruhan. Pengungkapan Corporate Social Responsibility kepada public digunakan oleh perusahaan untuk menunjukkan dasar tertentu atau politik kebijakan tanggung jawab lingkungan dan sosial sebagai komitmen dasar perusahaan terhadap Corporate Social Responsibility perusahaan yang melakukan pengungkapan Corporate Social Responsibility umumnya bersifat voluntary (sukarela), unaudited (belum diaudit), dan unregulated (tidak dipengaruhi oleh peraturan tertentu).

Ketiga pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial adalah suatu bentuk pertanggung jawaban yang seharusnya dilakukan perusahaan, atas dampak positif maupun dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas operasionalnya, dan mungkin sedikit-banyak berpengaruh terhadap masyarakat internal maupun eksternal dalam lingkungan perusahaan. Selain melakukan 25 aktivitas yang berorientasi pada laba, perusahaan perlu melakukan aktivitas lain, misalnya aktivitas untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman bagi karyawannya, menjamin bahwa proses produksinya tidak mencemarkan lingkungan sekitar perusahaan, melakukan penempatan tenaga kerja secara jujur, menghasilkan produk yang aman bagi para konsumen, dan menjaga lingkungan eksternal untuk mewujudkan kepedulian sosial perusahaan.

Untung (2009:6) menjelaskan apabila hubungan antara perusahaan dan masyarakat tidak kuat dapat dipastikan adanya suatu permasalahan, pelaksanaan program Corporate Social Responsibility belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat, hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian perusahaan terhadap pelaksanaan CSR. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dinilai manfaat Corporate Social Responsibility untuk perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan serta memotivasi peningkatan reputasi dan citra perusahaan
2. Dapat memperoleh lisensi untuk melakukan operasi secara sosial (Social Licence to Operate)
3. Adanya penekanan atas risiko bisnis perusahaan
4. Kegiatan usaha memiliki akses yang lebih luas atas sumber dayanya
5. Menambah akses menuju pasar dan membuka peluang yang pasar lebih besar
6. Adanya pengurangan biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah
7. Merekatkan hubungan dengan pihak berkepentingan (stakeholder)
8. Menciptakan hubungan baik dengan pengatur (regulator)
9. Memotivasi kinerja karyawan dan adanya peluang untuk mendapatkan penghargaan

Corporate Social Responsibility memiliki bentuk yang sangat beragam. Dimana setiap perusahaan mempunyai metode dan modelnya sendiri dalam melaksanakannya. Biasanya, perusahaan yang ada di Indonesia melakukan suatu program CSR dengan menggunakan salah satu dari empat metode berikut ini:

1. Keterlibatan Langsung

Model pelaksanaan yang pertama yaitu model keterlibatan langsung.

Ini adalah sebuah metode dimana perusahaan akan melakukan Corporate Social Responsibility secara langsung pada masyarakat umum. Misalnya, perusahaan menyediakan bantuan berupa uang tunai dan dibagikan kepada masyarakat sekitar yang kurang mampu. Kemudian bantuan tersebut diserahkan langsung oleh pihak perusahaan kepada masyarakat.

2. Melalui Yayasan atau Organisasi Sosial

Model selanjutnya yaitu dengan melalui sebuah yayasan atau pihak perusahaan membangun yayasan sosial sendiri. Metode yang satu ini hampir sama dengan yang dilakukan oleh perusahaan di berbagai negara maju. Tujuan dari model Corporate Social Responsibility ini yaitu untuk membangun yayasan sosial yang menyediakan bantuan untuk masyarakat sosial secara berkelanjutan.

3. Menjalin Kemitraan

Jika Grameds sudah memahami penjelasan mengenai apa itu Corporate Social Responsibility, tentu kita akan menyimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan sebagian besar adalah kegiatan sosial. Kemudian, selain dua model Corporate Social Responsibility seperti di atas, banyak perusahaan di Indonesia yang menggunakan model Corporate Social Responsibility ketiga yaitu Menjalin Kemitraan.

Model yang satu ini dilakukan dengan cara menjalin kemitraan dengan pihak luar atau pihak lainnya. Mitra yang diajak bekerjasama biasanya adalah mitra yang memang sudah mempunyai fokus utama di dalam bidang kegiatan sosial. Entah itu lembaga sosial yang dikelola oleh swasta maupun pemerintah, dan lainnya. Berikut adalah contohnya:

1. PMI (Palang Merah Indonesia)

Dengan mengandeng PMI, perusahaan bisa melakukan acara donor darah yang dapat diikuti oleh karyawan maupun masyarakat secara umum. Sehingga hal tersebut akan mendorong siapapun untuk ikut menolong sesama melalui donor darah.

2. Dompot Duafa

Melalui lembaga ini, perusahaan bisa menyediakan jasa atau layanan pengelolaan dana sosial. Misalnya, dana kemanusiaan, sedekah, zakat, dan lainnya.

3. Bergabung Dengan Konsorsium Model yang terakhir adalah dengan bergabung maupun hanya mendukung konsorsium. Apa itu konsorsium? Konsorsium adalah sebuah bentuk kerjasama antar dua pihak perusahaan guna melakukan sebuah proyek. Dimana proyek tersebut merupakan sebuah proyek sosial yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Misalnya saja, proyek perbaikan jalan, pembangunan gedung sekolah, pembangunan jembatan, dan kegiatan lain yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum yang ada di sekitar perusahaan.

Menurut Resturiyani (2012) menjelaskan bahwa tujuan perusahaan menerapkan CSR agar dapat memberi manfaat yang optimal bagi stakeholder dengan cara memenuhi tanggung jawab ekonomi, hukum, etika, dan kebijakan.

1. Tanggung jawab ekonomi

Kata kuncinya adalah: *make a profit*. Tujuan utama perusahaan yaitu mencetak profit karena keuntungan merupakan dasar dari sebuah perusahaan. Untuk menjaga eksistensinya, perusahaan perlu mempunyai nilai tambah dalam ekonomi sebagai syarat yang harus dipenuhi.

2. Tanggung jawab hukum

Kata kuncinya: *obey the law*. Perusahaan harus memiliki kepatuhan terhadap hukum. Dalam proses memperoleh keuntungan, perusahaan tidak diperkenankan melanggar kebijakan dan aturan yang telah dirumuskan oleh pemerintah.

3. Tanggung jawab etis

Kata kuncinya: be ethical. Perusahaan memiliki kewajiban untuk merealisasikan usaha dengan itikad baik, adil, jujur, serta tepat. Norma-norma masyarakat perlu menjadi acuan bagi perilaku organisasi perusahaan.

4. Tanggung jawab filantropis

Kata kuncinya: be a good citizen. Perusahaan sebaiknya juga turut serta mewujudkan keinginan masyarakat dengan manfaat nyata di samping kewajibannya mencetak profit dan mematuhi aturan hukum serta norma yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Baik karyawan maupun owner dari suatu perusahaan saat ini memiliki multi responsibility yaitu kepada perusahaan dan masyarakat yang saat ini disebut sebagai non-fiduciary responsibility.

Keempat poin Corporate Social Responsibility ini perlu dipahami sebagai satu kesatuan yang dapat diterapkan dalam perusahaan. Walaupun banyak yang menganggap bahwa laba yang harus diutamakan, karena laba merupakan cerminan keberhasilan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.

Namun, keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba tidak bisa dilakukan tanpa adanya kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan taat terhadap hukum yang berlaku. Sebaiknya, kegiatan untuk menghasilkan laba dikaitkan dengan pengembangan masyarakat sekitar dan pembangunan yang berkelanjutan, karena masyarakat memegang peranan penting dalam keberlangsungan bisnis perusahaan.

Corporate Social Responsibility bukan lagi hanya sekedar, kegiatan untuk memberdayakan masyarakat dengan memberikan sejumlah dana, namun sudah menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan untuk melaksanakan Corporate Social Responsibility yang diatur dalam undang-undang pada setiap tahunnya.

Kerangka Pemikiran

Dalam variabel ini menggunakan variabel yang terdiri dari satu variabel dependen yaitu kinerja keuangan perusahaan yang diproksi dengan menggunakan Corporate Social Responsibility (CSR) dan 2 variabel independen yang merupakan mekanisme Corporate Governance yaitu ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan institusional.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode yang datanya berupa angka-angka. Dalam penelitian ini data tersebut diperoleh melalui laporan tahunan perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan pada tahun 2019- 2021

Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

- Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Good Corporate Governance untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan

- Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini menggunakan unit analisis organization, yang sumber datanya merupakan respon dari divisi atau organisasi tertentu

- Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada industri manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI).

- **Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Jenis data yang diteliti adalah data kuantitatif, menurut Sugiyono (2016), metode penelitian Kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah data laporan tahunan perusahaan. Yang berdasarkan sumber datanya merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan situs resmi berbagai perusahaan yang menjadi sampel penelitian

Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode dalam pengumpulan data, yaitu: Berdasarkan sumber data sekunder:

- Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari dokumentasi perusahaan berupa laporan tahunan atau annual report. sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum laporan tahunan atau annual report diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

Metode Pengolahan/Analisis Data

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai suatu variabel yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum (Ghozali, 2006). Standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum menggambarkan persebaran data. Data yang memiliki standar deviasi yang semakin besar menggambarkan data tersebut semakin menyebar. Standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum menggambarkan persebaran variabel yang bersifat metrik, sedangkan variabel non-metrik digambarkan dengan distribusi frekuensi variabel.

Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini akan menggunakan teknik regresi berganda. Hal ini disebabkan karena penelitian ini terdapat lebih dari 1 variable independen dengan 1 variable dependen. Untuk dapat melakukan regresi ini, model regresi harus diuji terlebih dahulu apakah sudah memenuhi asumsi klasik. Apabila ada satu syarat saja yang tidak terpenuhi, maka hasil analisis regresi tidak dapat dikatakan bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Syarat asumsi klasik tersebut agar menjadi model persamaan estimasi yang baik, yaitu:

1. Error menyebar normal atau data berdistribusi normal dengan rata-rata nol dan memiliki suatu ragam (variance) tertentu yang diketahui melalui uji normalitas.
2. Tidak terjadi heteroskedastisitas pada ragam error sehingga bersifat homoskedastis.
3. Tidak terjadi multikolinieritas antara variable bebas yang diketahui melalui uji multikolinier.
4. Error tidak mengalami autokorelasi (error tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri).

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah salam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal. Alat uji yang digunakan adalah dengan analisis grafik histogram dan grafik normal probability plot dan uji statistik Kolmogorov- Smirnov Z (1- Sample K-S). Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S) adalah:

1. Apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05 maka H_0 ditolak. Hal ini berarti data residual terdistribusi tidak normal.
2. Apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05 maka H_0 diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak konstan pada regresi sehingga akurasi hasil prediksi menjadi meragukan. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apabila dalam model regresi terjadi ketidakamaan Variance dan residual satu observasi lain. Heteroskedastisitas menggambarkan nilai hubungan antara nilai yang diprediksi dengan Studentized delete Residual nilai tersebut. Cara memprediksi ada tidak heteroskedastisitas pada satu model dapat dilihat dari pola gambar Scatterplot model. Analisis pada gambar Scatterplot yang menyatakan model regresi linier berganda tidak terdapat heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Multikolinieritas terjadi jika ada hubungan linear yang sempurna atau hampir sempurna antara beberapa atau semua variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2006). Untuk menguji ada tidaknya multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Batas untuk tolerance adalah 0,10 dan batas VIF adalah 10 (Ghozali, 2006). Jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,10 dan nilai VIF lebih besar dari 10, maka terjadi multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi pada model regresi. Metode pengujian menggunakan uji Durbin Watson (Uji DW).

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kriteria pengujiannya adalah apabila nilai durbin-watson > F tabel, diantara variabel bebas dalam persamaan regresi ada autokolerasi.
2. Kriteria pengujiannya adalah apabila nilai durbin – watson < F tabel, aiantara variabel bebas dalam persamaan regresi tidak da autokolerasi.
3. Nilai du dan dl dapat diperoleh dari tabel statistik Dubin –Watson yang bergantung banyaknya observasi dan banyaknya variabel yang menjelaskan.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis pengaruh karakteristik Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan perusahaan (H1 dan H2) menggunakan alat analisis regresi berganda. Model persamaan regresi tersebut sebagai berikut:

$$ROA = \beta_0 + \beta_1 DEKOM + \beta_2 KEPINS + \varepsilon$$

Dimana:

CSR = Corporate Social Responsibility

DEKOM = Dewan komisaris

KEPINS = Kepemilikan institusional β_0 = Konstanta

β_1 – β_4 = Koefisien regresi

ε = Error

Uji Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan koefisien determinasi (R²), nilai statistik F, dan uji signifikansi parameter individual (Uji statistik t).

Koefisien Determinasi (R²)

Untuk menguji seberapa jauh kemampuan model penelitian dalam menerangkan variabel dependen (Goodness Of Fit), yaitu dengan menghitung koefisien determinasi (R²). Ghazali (2006) mengatakan Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.

Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel- variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Ghozali (2006) menjelaskan bahwa kelemahan mendasar dari penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Bias yang dimaksudkan adalah setiap tambahan satu variabel independen, maka nilai R² akan meningkat tanpa melihat apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Ghazali (2006) mengatakan bahwa disarankan menggunakan nilai adjusted R² pada saat mengevaluasi model regresi yang baik, hal ini dikarenakan nilai adjusted R² dapat naik dan turun bahkan dalam kenyataannya nilainya dapat menjadi negatif. Apabila terdapat nilai adjusted R² bernilai negatif, maka dianggap bernilai nol.

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Ghozali (2006) menyatakan bahwa uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan ke dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama

terhadap variabel dependen atau terikat. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Quick Look: Bila nilai F lebih besar daripada 4 maka H₀ dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel maka H₀ ditolak dan hipotesis alternatif (H_A) diterima.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Menurut Ghozali (2006) uji stastistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 ($\alpha=5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Jika nilai signifikan \leq 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Deskripsi data penelitian bertujuan untuk menggambarkan data-data yang sesuai dengan judul penelitian, yaitu pengaruh mekanisme Good Corporate Governance terhadap CSR pada perusahaan sektor industri barang konsumen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu Perusahaan sektor barang konsumen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2021 bersumber dari www.idx.co.id. Sampel yang diambil sebanyak 20 perusahaan sektor barang konsumen dengan 3 tahun penelitian. Sehingga, menghasilkan 102 data laporan keuangan untuk penelitian.

Analisis Statistik Deskriptif Penelitian

Berdasarkan hasil statistik deskriptif diperoleh sebanyak 60 data observasi yang berasal dari hasil perkalian antara periode penelitian yaitu, selama tiga tahun dari 2017-2019. dengan jumlah sampel perusahaan yaitu sebanyak 60 perusahaan. berikut adalah tabel statistik penelitian yaitu:

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Perusahaan	60	2	9	3,20	1,90
Kontribusi	60	0,00	,35	,012	,2402
F&B	60	15 45616100000	4590024000	30279 000000	
Varian	60				
Median					

Sumber : Output SPSS 26 Data Diolah Oleh Peneliti

Berikut adalah penjelasan tabel 4.1 yaitu:

- a. Nilai minimum Dewan Komisaris sebesar 2 dan nilai maximum sebesar 8. dengan nilai rata-rata sebesar 3.20 dengan Standar Deviasi sebesar 1.560
- b. Nilai minimum Kepemilikan Institusional sebesar 0.00 dan nilai maximum sebesar 0.98 dengan nilai rata-rata sebesar 0.7013 dengan Standar Deviasi sebesar 0.24322
- c. Nilai minimum CSR sebesar 0.16 dan nilai maximum sebesar 538461538,00 dengan nilai rata-rata sebesar 47692307,9658 dengan Standar Deviasi sebesar 134275413,36477

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model resgresi, variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan metode kolmogorov-smirnov.

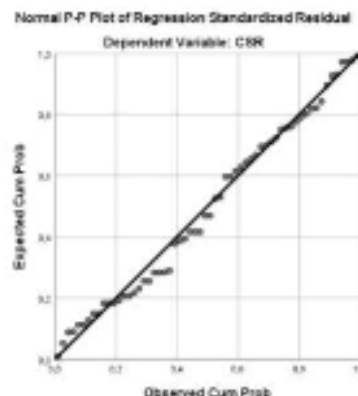
Tabel 4.2 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Unstandardized Residual		
N	60	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.000000
	Std. Deviation	121722311.8
		6975639
Most Extreme Differences	Absolute	.097
	Positive	.097
	Negative	-.052
Test Statistic		.097
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan hasil uji diatas, dengan jumlah data penelitian sebanyak 60, dan nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0.200 yang berarti lebih besar dari taraf signifikansi sebesar 0,05 hal ini berarti data berdistribusi normal.

Gambar 4.1 Grafik P-P Plot Uji Normalitas



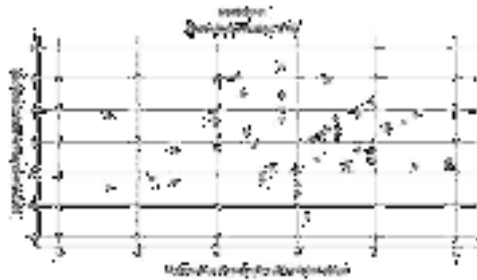
Sumber : Output SPSS 26 Data Diolah Oleh Peneliti

Dapat dilihat pada gambar 4.1 normal regression standardized residual bahwa titik-titik mengikuti arah garis diagonal. Maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan dapat dilanjutkan kepengujian selanjutnya.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap sama, maka disebut homokedastisitas, dan jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas.

Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Output SPSS 26 Data Diolah Oleh Peneliti

Gambar diatas menunjukkan grafik scatterplot dan menghasilkan titik - titik yang menyebar secara acak diatas maupun dibawah angka 0 dan sumbu Y. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi dan data layak digunakan untuk penelitian.

Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen

Model	1	2	3	4
1	1,000			
2		1,000		
3			1,000	
4				1,000

a. Dependent Variable: CSR

Sumber: Output SPSS 26 Data Diolah Oleh Peneliti

Berdasarkan tabel nilai VIF variabel Dewan komisaris dan Kepemilikan Institusional tidak lebih dari 10 sehingga model regresi bebas dari gejala multikolonieritas.

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear pada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

Tabel 4.4 Uji Autokorelasi

Model	1
1	1,994

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris

b. Dependent Variable: CSR

Berdasarkan hasil pengujian diatas diperoleh nilai Durbin – Watson sebesar 1,099 nilai ini akan dibandingkan dengan nilai DW tabel dengan jumlah sampel sebanyak 60 dan variabel independen (bebas) sebanyak 2. Maka di dapatkan nilai dl (Nilai Batas Bawah sebesar 1,6475 dan nilai du (Nilai Batas Atas) sebesar 1,5052 oleh karena itu nilai Dw berada diantara Du Dw (1,611) maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

Uji Regresi Berganda

Analisis Berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen.

Tabel 4.5 Uji Regresi Berganda

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	B	Std. Error	Standardized Coefficients		
1	145,381	63,225		2,300	,028
	228,109	104,09		2,190	,033
	2,039	1,018		2,003	,051

a. Dependent Variable: CSR

Sumber : Output SPSS 26 Data Diolah Oleh Peneliti

Berdasarkan hasil pengujian SPSS tersebut diperoleh persamaan regresi sebagai berikut : $Y = 145,381 + (228.109) X_1 + ((0.040)X_2 + \epsilon$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat diketahui bahwa :

1. Konstanta sebesar 145,381 menunjukkan bahwa nilai dari variabel independen (Dewan Komisaris, dan Kepemilikan Institusional) adalah 0 atau tidak mengalami perubahan, maka besarnya nilai CSR adalah sebesar 145,381.
2. Variabel Dewan Komisaris memiliki nilai koefisien regresi sebesar 228.109 yang menyatakan bahwa jika terjadi penambahan 1 dari Dewan Komisaris maka nilai variabel dependen yaitu CSR akan bertambah sebesar 228.109 dimana variabel yang lain dianggap konstan.
3. Variabel Kepemilikan Institusional memiliki nilai koefisien regresi sebesar 2.039 yang menyatakan bahwa jika terjadi penambahan 1 dari Dewan Institusional maka nilai variabel dependen yaitu Return On Asset akan bertambah sebesar 2.039 dimana variabel yang lain dianggap konstan.

Uji Koefisien Determinasi

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen.

Tabel 4.6 Uji Koefisien Determinasi

Model	Model Summary ^a		
	R	R Square	Adjusted R Square
1	,681	,464	,429

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris

b. Dependent Variable: CSR

Berdasarkan hasil tabel diatas menunjukkan nilai koefisien determinasi atau R square sebesar 0.480 atau sebesar 48% maka CSR dapat dijelaskan oleh Dewan Komisaris, dan Kepemilikan Institusional. Sedangkan sisanya sebesar 52% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Uji t

Pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. berikut adalah tabel uji t:

Tabel 4.7 Uji t (Pengujian Secara Parsial)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	145,751	63,225		3,112	,000
Dewan Komisaris	211,609	30,699		6,899	,000
Kepemilikan Institusional	2,073	1,512		1,371	,176

Dependent Variable: CSR

Sumber : Output SPSS 26 Data Diolah Oleh Peneliti

Dapat dilihat pada tabel uji t diatas, untuk mengetahui besarnya nilai signifikansi suatu variabel independen terhadap variabel dependen dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Uji t variabel dewan komisaris (X1) menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0.000 maka H0 diterima. dan hasil t hitung sebesar 6.809 dan hasil t tabel sebesar 1.671 dengan demikian H1 Diterima yang artinya dewan komisaris berpengaruh secara parsial terhadap CSR.
2. Uji t variabel Kepemilikan Institusional (X2) menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0.963 maka H0 ditolak. dan hasil t hitung sebesar 1.043 dan hasil t tabel sebesar 1.671 dengan demikian H2 yang artinya kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara parsial terhadap CSR.

Uji F

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Berikut adalah tabel uji f (Simultan):

Tabel 4.8 Uji F (Pengujian Secara Simultan)

Model		ANOVA			F	Sig.
		Sum of Squares	df	Mean Square		
1	Regression	41100,611	2	20550,305	12,233	,000
	Residual	5692,735	57	99,873		
	Total	47093,346	59			

a. Dependent Variable: CSR

b. Predictors: (Constant), Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional

Sumber : Output SPSS 26 Data Diolah Oleh Peneliti

1. Jika nilai signifikansi sebesar 0.05 lebih kecil dari nilai signifikansi output spss ($0.000 < 0.05$) maka H0 diterima maka dapat dikatakan signifikan.
2. berdasarkan hasil F hitung dan F tabel tersebut maka dapat disimpulkan bahwa F hitung $>$ F tabel ($12.233 > 2.76$) dengan demikian H4 diterima artinya ada pengaruh secara simultan antara variabel dewan komisaris, dan kepemilikan institusional terhadap CSR.

Pembahasan

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap CSR

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap CSR. Adanya pengaruh antara ukuran dewan komisaris dengan pengungkapan CSR mengandung arti bahwa semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris suatu perusahaan akan meningkatkan luas pengungkapan CSR.

Dewan komisaris mempunyai peran sebagai seorang yang bertugas mengawasi dan memberikan saran-saran kepada direksi dalam lingkup pengelolaan perusahaan.

Ukuran dewan komisaris yang besar dalam suatu perusahaan akan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi dalam mengelola perusahaan, termasuk dalam praktik dan pengungkapan CSR.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Izza Ariqah R, dkk (2018) yang menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap CSR

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap CSR. Hal ini menunjukkan bahwa tanggungjawab sosial perusahaan tidak terpengaruh oleh faktor kepemilikan yang dimiliki oleh institusional (seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan lainnya) dalam pengungkapannya karena semakin besar kepemilikan institusi, pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan tidak selalu luas.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Siska Wia Utami (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap CSR.

KESIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah di jelaskan di bab terdahulu mengenai pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial. maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil uji t menunjukkan bahwa Dewan Komisaris berpengaruh secara parsial terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) dengan nilai signifikansi sebesar ($0.000 < 0.05$).
2. Hasil Uji t menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh secara parsial terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) dengan nilai signifikansi sebesar ($0.963 > 0.05$).
3. Hasil uji f menunjukkan bahwa Dewan Komisaris, Dan Kepemilikan.

Institusional berpengaruh secara simultan terhadap Corporate Social Responsibility (CSR).

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi para Investor, jika ingin berinvestasi berupaya untuk mendapatkan mendapatkan informasi yang sendiri mungkin, agar tidak terjadi informasi asimetris dalam pengambilan keputusan investasi.
2. Bagi perusahaan, sebaiknya memberikan keputusan informasi tentang laporan keuangannya agar para investor dapat mengakses dengan mudah informasi yang dibutuhkan dan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak investor dan perusahaan sendiri.
3. Bagi peneliti yang melakukan pengamatan dengan judul sejenis diharapkan untuk melanjutkan penelitian ini dengan menambahkan sampel perusahaan yang akan dijadikan sampel penelitian, baik melakukan penelitian pada sektor lain, menambah tahun penelitian, menambah sektor penelitian selain sektor barang konsumen.

DAFTAR PUSTAKA²

- Arifani, R. (2013). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. Malang: Universitas Brawijaya.
- Boediono, G.S.B. 2005. "Kualitas Laba : Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Dan Dampak Manajemen Laba Dengan Menggunakan Analisis Jalur". Simposium Nasional Akuntansi VIII. Solo.
- Chaniago, S., & Magdalena, M. M. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). KARIMAH TAUHID, 1(5), 713-728.
- Fadillah, M. N., & Rosilawati, Y. (2020). Manajemen Humas Dalam Mendukung Terwujudnya Good Governance (Studi Kasus Di Pemerintah Daerah Yogyakarta). Prosiding UMY Grace, 1(1), 977-985.
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Negara, I. K. (2019). Analisis pengaruh good corporate governance terhadap nilai perusahaan dengan corporate social responsibility sebagai variabel pemoderasi (studi pada indeks sri-kehatiyang listed di BEI). Jmm Unram-Master of Management Journal, 8(1), 46-61.
- Noorizkie, Gizka. 2013. "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2010-2011)". Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro: Semarang.
- Salsabilla, A. I., Indriani, E., & Kartikasari, N. (2022). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Perusahaan BUMN. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 2(3), 394-406.
- Saribu, D., & Afriliyani, M. (2020). PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018).
- Sembiring, Eddy. (September, 2005). Karakteristik Perusahaan Dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Study Empiris Pada Perusahaan Yang Tercatat Di Bursa Efek Jakarta. Simposium Nasional Akuntansi VII, Solo.
- Sinaga, S. P. (2020). Pengaruh Pengungkapan Good Corporate Governance Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI Tahun 2010. Journal Economy And Currency Study (JECS), 2(1), 1-9.

² Untuk pedoman penulisan daftar pustaka secara lengkap, silakan dapat dilihat pada *author guidelines*.

- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tarigan, Y., & Adisaputra, D. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 8(2), 163-170
- Thasya, N., Lisah, L., Angeline, A., Gozal, N., Veronica, V., & Rahmi, N. U. (2020). Pengaruh good corporate governance terhadap corporate social responsibility pada perusahaan sub sektor transportasi. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 69-82.
- Tisna, G. A. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).
- Ratih, Suklimah, dan Yulia Setyarini. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) dan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan Pertambangan yang Go Public di BEI. *Akrual*, Vol. 5 No. 2, 115-132.
- Rohmawati, E., & Sutapa, S. (2020). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (PBV) DENGAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Ekonomi*.
- Wahyudi, Isa dan Busyra Azheri. 2008. *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, Malang: In-Trans Publishing.
- Widyastuti, S. K., & Sri Padmantlyo, M. B. A. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris Perusahaan Farmasi di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).